

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini semakin meningkat kesadaran akan adanya suatu laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah sangat berguna bagi semua kalangan, baik kalangan internal maupun eksternal. Penyusunan laporan keuangan ini perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan seperti satuan kerja dan KPPN selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Satuan kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

KPPN adalah singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang merupakan sebuah instansi vertikal Pemerintah Pusat yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan. Kedua pemangku jabatan ini harus memperhatikan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dipercaya, dan dapat dibandingkan.

Kualitas laporan keuangan tersebut agar dapat terpenuhi, maka perlu dilakukannya rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah salah satu pengendalian internal dalam sistem akuntansi pemerintah dan salah satu kunci utama dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh perannya dalam meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihasilkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Hal ini dilakukan sebelum laporan keuangan yang disusun oleh satuan kerja maupun KPPN disampaikan kepada unit akuntansi di atasnya.

Pentingnya rekonsiliasi yang dilakukan oleh satuan kerja dengan KPPN atas pencocokan data SAPP dengan SAI adalah salah satu pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang tertera pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) yang diterbitkan oleh satuan kerja, kemudian terbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibuat oleh Aplikasi SAS (Sistem Akuntansi Satker). SPM ini kemudian diterbitkan dan diproses oleh sistem menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D ini diterbitkan oleh KPPN melalui Aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

Rekonsiliasi pada awalnya dilakukan secara manual, namun dianggap tidak efektif dan efisien karena tidak akurat/valid atau sering terjadi kesalahan dalam pencatatan dan perekaman data. Sejak Mei 2016, pemerintah telah menyediakan aplikasi web yang bernama Aplikasi e-Rekon&LK yang berfungsi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam merekonsiliasi laporan keuangan pemerintah.

Laporan hasil rekonsiliasi yang telah diproses oleh sistem ini dituangkan dalam *file excel*. Fasilitas *Pivot Table* yang tersedia dalam *excel* mampu merangkum data dalam jumlah yang besar dengan waktu yang singkat. *Pivot*





Table ini digunakan untuk mempercepat dalam menganalisis data (Sistem Akuntansi Pusat) SiAP dan SAI.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam prosedur rekonsiliasi eksternal dalam sebuah laporan akhir dengan judul : “Analisis Sistem Akuntansi atas Rekonsiliasi Eksternal pada KPPN Jakarta VII”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dari topik laporan akhir ini adalah :

1. Apa saja kebijakan rekonsiliasi eksternal pada KPPN Jakarta VII?
2. Apa saja fitur-fitur yang terdapat pada Aplikasi e-Rekon&LK?
3. Bagaimanasistem akuntansi atas prosedur rekonsiliasi eksternal pada Seksi Vera KPPN Jakarta VII?
4. Bagaimana cara menganalisis laporan hasil rekonsiliasi eksternal menggunakan *Pivot Table*?
5. Apa saja masalah-masalah yang muncul pada saat mengakses Aplikasi e-Rekon&LK?
6. Apa sanksi yang diberikan kepada satuan kerja apabila tidak melakukan rekonsiliasi?



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Menguraikan kebijakan prosedur rekonsiliasi eksternal pada KPPN Jakarta VII.
2. Menguraikan fitur-fitur yang terdapat pada Aplikasi e-Rekon&LK.
3. Menguraikan sistem akuntansi atas prosedur rekonsiliasi eksternal menggunakan Aplikasi e-Rekon&LK, meliputi; dokumen dan catatan yang digunakan, stakeholder yang terlibat, prosedur dan bagan alir/flowchart, rekonsiliasi eksternal menggunakan Aplikasi e-Rekon&LK, serta menguraikan sistem pengendalian internal berdasarkan standar COSO pada Seksi Vera KPPN Jakarta VII.
4. Menganalisis laporan hasil rekonsiliasi eksternal menggunakan *Pivot Table*.
5. Menguraikan masalah-masalah yang muncul pada saat mengakses Aplikasi e-Rekon&LK.
6. Menguraikan sanksi yang diberikan kepada satuan kerja apabila tidak melakukan rekonsiliasi.

1.4 Manfaat

Hasil laporan akhir diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan yaitu :

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Membangun relasi dengan instansi atau perusahaan yang terkait.
 - b. Menambah pengalaman terjun ke lapangan pekerjaan secara langsung.
 - c. Mengimplementasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Bagi KPPN
 - a. Membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara KPPN dengan pihak kampus.
 - b. Memberikan saran-saran yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas data KPPN Jakarta VII.
3. Bagi Program Studi Akuntansi
 - a. Menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu selama masa praktik kerja lapangan.
 - b. Membangun relasi antara instansi dengan program studi akuntansi.
 - c. Mempersiapkan lulusan program studi akuntansi yang berkompentensi dan berkualitas.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah

Rachmat (2010:19) menyatakan “Akuntansi adalah sistem pelaporan, perhitungan, pengelompokan, informasi, dan ringkasan-ringkasan yang bersifat kuantitatif mengenai keuangan dengan seluruh transaksi yang sudah dilaksanakan oleh suatu lembaga atau perusahaan”.

Akuntansi berfungsi untuk mengontrol seluruh transaksi yang berhubungan dengan penggunaan keuangan negara dan kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan negara, akuntansi membantu pemerintah berkaitan dengan penggunaan keuangan negara yang pada hakikatnya merupakan uang rakyat. Untuk menghindari kesalahan pengambilan keputusan, salah satu cara yang ditempuh pemerintah dalam menggunakan benda-benda ekonomi adalah dengan mendasarkan semua keputusan ekonominya pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemerintah lebih akurat dalam melaksanakan berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahannya, terutama yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Akuntansi menjadi pedoman perhitungan penganggaran biaya keperluan pemerintah yang sejauh mungkin menghindarkan dari pengeluaran yang tidak bermanfaat.

